

**POLITIK PEMERATAAN HAK – HAK WARGA NEGARA (STUDI
PENDATAAN PADA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2020)**

Nadya Tiara

Universita Bangka Belitung

Email: nadyatiaraa02@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi permasalahan besar akibat wabah Covid-19, yang berdampak signifikan pada semua aspek, terutama ekonomi. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk membantu masyarakat yang terdampak. Pelaksanaan program BST di Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai prosedur, di mana masyarakat penerima bantuan dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan melalui verifikasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemerataan hak-hak warga negara terkait pendataan pada penyaluran BST serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Teori yang digunakan adalah teori keadilan sosial John Rawls, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan dan penyaluran program BST di Kota Pangkalpinang berjalan efektif, terbukti dari ketepatan sasaran dan waktu pencairan bantuan, serta pemahaman masyarakat mengenai program tersebut. Faktor pendukung meliputi koordinasi, kerja sama, dan komunikasi antara instansi dan pihak pelaksana.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pemerataan, Bantuan Sosial Tunai.

Abstract

The Politics Of Equitable Citizen Rights (Data Collection Studi On The Distribution Of Cash Social Assistance Programs During The Covid-19 Pandemic In Pangkalpinang City In 2020)

By

Nadya Tiara

In 2020, Indonesia faced significant challenges due to the Covid-19 outbreak, which had a profound impact on all aspects, particularly the economy. In response, the government implemented the Cash Social Assistance (BST) program to support affected communities. The implementation of the BST program in Pangkalpinang City was conducted in accordance with established procedures, where beneficiaries were selected based on specific criteria and data verification. This study aims to analyze the process of equality in citizen rights related to data collection for BST distribution and to identify supporting and inhibiting factors in the process. The theory used is John Rawls' theory of social justice, employing a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the data collection and distribution process of the BST program in Pangkalpinang City has been effective, as evidenced by the accuracy of target recipients, timely disbursement of assistance, and community understanding of the program. Supporting factors include coordination, cooperation, and communication among implementing agencies.

Keywords: Social Justice, Equality, Cash Social Assistance.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 telah membawa perubahan besar dan mendalam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya (Saebah & Merthayasa, 2023). Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus pertama terkonfirmasi pada Maret 2020, dan sejak saat itu, angka infeksi terus meningkat secara eksponensial, membawa dampak serius pada berbagai sektor kehidupan (Purwaningsih, 2021).

Salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran virus, berdampak langsung pada aktivitas ekonomi (Rosita, 2020). Banyak usaha yang harus tutup sementara, proses belajar-mengajar dipindahkan ke platform daring, dan aktivitas sehari-hari masyarakat dibatasi secara ketat. Kondisi ini memperparah situasi ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, di mana banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan (Napitupulu & Utama Ritonga, 2023). Pemerintah berupaya keras memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan merata, namun dalam pelaksanaannya, muncul berbagai tantangan, termasuk masalah terkait pendataan penerima bantuan sosial.

Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial juga tidak lepas dari kendala. Meskipun secara umum distribusi bantuan telah dilakukan, namun masih terdapat permasalahan terkait dengan pendataan penerima. Banyak keluhan muncul terkait data penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti adanya NIK ganda dan ketidaksesuaian antara NIK dan Kartu Keluarga (KK). Masalah-masalah ini menyebabkan beberapa warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara mereka yang tidak seharusnya menerima, malah mendapatkan bantuan tersebut. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menuntut adanya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses pemerataan hak-hak warga negara dalam konteks penyaluran bantuan sosial, khususnya di Kota Pangkalpinang. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program BST dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pemerataan hak-hak warga negara dalam menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang politik pemerataan hak-hak warga negara dengan fokus pada pendataan penerima BST di Kota Pangkalpinang selama pandemi COVID-19. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana program bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintah daerah mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu

meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi dan menjaga kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menggali secara mendalam terkait proses pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Pangkalpinang selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mendetail.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif mengandalkan pengumpulan data berupa kata-kata dan kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang ada secara rinci dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada [sebutkan waktu penelitian] di Kota Pangkalpinang, khususnya di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Pangkalpinang. Lokasi ini dipilih karena terdapat permasalahan terkait pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Pangkalpinang. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi penerima BST, petugas pendataan BST, dan pegawai Dinas Sosial Kota Pangkalpinang.

Prosedur

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, termasuk penerima BST dan petugas pendataan.
2. Observasi langsung di lapangan untuk mengamati proses penyaluran BST dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi, buku, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Instrumen yang digunakan meliputi panduan

wawancara, catatan observasi, kamera, dan alat perekam suara. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data: Memilih dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data menjadi lebih sistematis dan mudah ditelusuri.
2. Penyajian data: Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau narasi deskriptif untuk memperjelas temuan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan data yang telah dianalisis, peneliti akan menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemerataan Hak-Hak Warga Negara dalam Pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pangkalpinang terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan pemerataan hak masyarakat, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun program ini berupaya untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Petugas Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat penerima BST untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana program ini dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Program BST, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dea dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, adalah bantuan keuangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini tidak diberikan secara rutin, melainkan insidentil, tergantung pada situasi darurat seperti pandemi. Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 per KK.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang mencuat, seperti ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mufida (2020), kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan menimbulkan masalah baru. Kekisruhan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya (Mufida, 2020).

2. Proses Pendataan dan Penyaluran Bantuan

Dalam proses pendataan dan penyaluran BST, peran kelurahan dan bank lokal seperti Bank Sumsel sangat penting. Berdasarkan wawancara dengan Ibu

Gepa, seorang PSM dari Kelurahan Pasir Putih, diketahui bahwa pendataan calon penerima dilakukan melalui pengumpulan fotokopi NIK dan KK dari masyarakat yang kurang mampu atau terdampak COVID-19. Setelah didata, bantuan disalurkan melalui kantor pos atau bank, tergantung pada mekanisme yang ditentukan.

Namun, permasalahan yang terjadi dalam pendataan ini adalah adanya potensi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Parina, seorang penerima BST, meskipun bantuan ini sangat membantu, terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidakmerataan distribusi bantuan. Beberapa warga merasa bahwa bantuan tidak sepenuhnya mencakup semua yang berhak, dan ada kecemburuan sosial di antara masyarakat yang tidak menerima bantuan.

3. Evaluasi Program dan Hambatan dalam Implementasi

Secara keseluruhan, program BST di Kota Pangkalpinang dinilai sudah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, berdasarkan evaluasi dan wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program ini, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan keterbatasan dalam pengawasan penyaluran bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga komunikasi publik yang lebih efektif agar masyarakat memahami dengan jelas tentang program bantuan ini dan mekanisme penerimaannya.

4. Implementasi Teori Keadilan Sosial dalam Program BST

Penelitian ini juga mengkaji program BST dalam kerangka teori keadilan sosial John Rawls. Berdasarkan teori ini, distribusi hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil dan merata, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Dalam konteks ini, program BST di Kota Pangkalpinang dapat dikatakan sudah berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan sosial dengan memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Namun, seperti yang dijelaskan dalam teori keadilan sosial, keadilan tidak hanya bergantung pada distribusi yang adil tetapi juga pada pelaksanaan yang efektif dan efisien (Mulyawan, 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan keadilan sosial dalam pelaksanaan BST, pemerintah perlu mengatasi masalah-masalah yang masih ada, seperti ketidaktepatan data dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program BST di Kota Pangkalpinang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan program ini melalui koordinasi yang lebih baik, perbaikan mekanisme pendataan, dan komunikasi yang lebih jelas dengan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Politik Pemerataan Hak – Hak Warga Negara (Studi Pendataan Pada Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pangkalpinang Tahun 2020)s,” dapat disimpulkan bahwa proses pendataan dalam program Bantuan Sosial Tunai di Kota Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dari ketepatan sasaran pemberian bantuan, ketepatan waktu pencairan, serta pemahaman masyarakat tentang program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Program ini telah mencapai tujuan pemerintah kota untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi. Namun, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendataan ini. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik antara instansi dan pihak kelurahan, serta kerjasama dengan Bank Sumsel yang memungkinkan pencairan dana secara lancar dan transparan. Sementara itu, faktor penghambat seperti kurangnya pembaruan data sering kali menyebabkan ketidakakuratan dan permasalahan dalam pendataan.

Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar Kementerian Sosial sebagai perencana kebijakan dalam program bantuan sosial dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, seperti Dinas Sosial dan pihak kelurahan. Pembaruan data secara berkala sangat penting untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. Selain itu, masyarakat yang menerima bantuan diharapkan dapat bijak dalam menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *'ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Mulyawan, W. (2024). Evaluasi Etika Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima: Menjaga Dignitas dan Kesejahteraan Masyarakat. *Public Service And Governance Journal*, 5(2), 85–100.
- Napitupulu, R., & Utama Ritonga, F. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Periode Oktober-Desember 2020 Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Kelurahan Padang Bulan Selayang Ii Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli, 2023(13), 548–560. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157398>
- Purwaningsih, E. (2021). Analisis Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Analisis Kelompok Risiko Terhadap Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun

2020. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(2), 86–93.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/61663>

Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>

Saebah, N., & Merthayasa, A. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Mengelola Perubahan Bisnis yang Disebabkan oleh Krisis Global. *Syntax Idea*, 5(7), 865–871. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2517>